

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang mengandung arti bahwa hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

“Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas yang juga merupakan penegakan keadilan”.<sup>1</sup> Apabila dikonkretkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum. Tujuan hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>2</sup>

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat negara yang mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum, terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri, khususnya mencegah dan

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 88.

<sup>2</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 14.

menanggulangi tindak-tindak kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian peranan POLRI tidak sekedar penegakan hukum, tetapi juga dituntut memainkan peran mencegah pelanggaran masyarakat dengan berbagai corak dan variasinya.

Dalam upaya penegakan hukum, tugas dan peranan POLRI tidak hanya tertuju pada masalah kejahatan, tetapi juga ditujukan pada masalah pelanggaran, salah satunya adalah mengenai masalah pelanggaran lalu lintas. POLRI khususnya Polisi Lalu Lintas, yang mempunyai tugas dan peranan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, tentunya tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat luas. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dewasa ini, masalah ketertiban lalu lintas selalu menjadi perhatian masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan. Masalah tersebut meliputi kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas sampai dengan masalah kecelakaan lalu lintas. Untuk dapat mewujudkan kondisi yang menunjang berbagai kepentingan secara optimal, masalah lalu lintas tidak dapat diabaikan begitu juga berpengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas maupun terjadinya kecelakaan lalu lintas, misalnya tidak dipenuhinya syarat uji kelaikan kendaraan bermotor.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai potensi dalam permasalahan lalu lintas. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua Polres Sanggau Januari sampai dengan Desember Tahun 2010 diketahui terdapat

jumlah pelanggaran sebanyak 1956 pelanggaran, dengan jenis pelanggaran SIM sebanyak 1278, STNK sebanyak 317, alat perlengkapan kendaraan bermotor sebanyak 262, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sebanyak 52, pelanggaran tidak menggunakan helm sesuai ketentuan sebanyak 38 dan pelanggaran lain-lain sebanyak 9 pelanggaran.<sup>3</sup>

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas pemakai sepeda motor di Kabupaten Sanggau tentu sangat memprihatinkan. Diperlukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh guna menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seluruh elemen termasuk masyarakat harus menyadari pentingnya kedisiplinan dalam berlalu-lintas guna mewujudkan lalu lintas yang tertib, sehingga angka kecelakaan lalu lintas juga dapat ditekan. Oleh karena itu, Polisi Lalu Lintas sebagai aparat yang berkompeten dalam penanganan masalah lalu lintas mempunyai peran yang besar.

Untuk mengetahui sejauh mana upaya dan peranan POLRI khususnya Polisi Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau Kalimantan Barat saja. POLRI, khususnya Polisi Lalu Lintas sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di bidang lalu lintas mempunyai peranan yang sangat besar. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, POLRI tentunya juga mempunyai kendala-kendala yang bisa mempengaruhi keoptimalan fungsi atau perannya. Kendala-kendala

---

<sup>3</sup> Data Pelanggaran Polisi Lalu Lintas Ranmor Roda Dua Polres Sanggau Tahun 2010.

tersebut misalnya terdapat pada sarana dan prasarana operasional, sumber daya anggaran atau kurangnya sumber daya manusia. Sementara itu, kendala yang paling berat terletak pada masalah kedisiplinan dan kesadaran hukum dari masyarakat pemakai kendaraan bermotor.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ternyata tidak mungkin dapat dilakukan melalui salah satu bentuk upaya kegiatan saja, melainkan harus disertai dengan berbagai upaya komprehensif yang diarahkan kepada semua faktor atau yang bersifat kondusif terhadap terjadinya permasalahan lalu lintas, serta harus melibatkan peran serta yang aktif dari masyarakat. Masalah yang ada dalam bidang lalu lintas tersebut tidak akan lepas dari masyarakat pemakai jalan. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengemudi, baik karena kesengajaan, misalnya tidak memakai helm, melanggar lampu merah, maupun karena kealpaan, misalnya: lupa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau lupa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau pelanggaran lalu lintas yang dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas. Di samping itu faktor kendaraan khususnya terhadap kendaraan bermotor roda dua, serta hambatan-hambatan yang dialami Polisi Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, tidak cukup hanya memperhatikan ketentuan yang ada atau yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi akan lebih jelas lagi apabila diadakan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
  - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk mengetahui data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

### 1. Bagi Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

### 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

### 3. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

#### 4. Lembaga Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

#### E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terdapat penelitian tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, karya April Ajariyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini menekankan pada penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara umum di Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan beberapa program, dan penerapan sanksi dilakukan secara persuasif edukatif.
2. Skripsi dengan judul “Peran Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Berlalu Lintas”, karya Ronna Patricia Sibarani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini menekankan pada peran Polisi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas, dengan hasil penelitian bahwa peran Polisi belum maksimal dalam menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

Skripsi yang penulis tulis menekankan pada penanggulangan pelanggaran lalu lintas darat yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor khususnya sepeda motor, sehingga terdapat perbedaan. Apabila dikemudian

hari ditemukan karya lain yang sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud.
2. Polisi Lalu Lintas adalah polisi yang memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas.
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
4. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pengendara Sepeda Motor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan dalam perundang-undangan dalam rangka meneliti konsistensi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan nya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.



## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat yang meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

## 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada narasumber dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka. Studi pustaka adalah mempelajari bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

#### 5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau Provinsi Kalimantan Barat  
AKP. Chandra Kirana

b. 3 (tiga) orang Polisi Lalu Lintas yang berada pada Unit Patroli Polres Sanggau yaitu:

1) Ipda Antonius Mulyana

2) Ipda Anton Budi Aji

3) Ipda Rudi Raharja

6. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Sanggau yaitu Ibu Santi.

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif yaitu pengolahan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat.<sup>5</sup> Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu dari umum ke khusus.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 288.